

Determinan Kemiskinan Multidimensi Indonesia Wilayah Timur Tahun 2015-2021

Khofifah Oktharen¹, Dwirani Puspa Artha²

^{1, 2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

* **Korespondensi:** khofifahoktharen1910@gmail.com, dwiranipuspa@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

29 Juli 2025

Disetujui:

9 Agustus 2025

Terbit daring:

15 Agustus 2025

DOI: -

Sitasi:

Oktharen, K & Artha, D.P (2025). Determinan Kemiskinan Multidimensi Indonesia Wilayah Timur Tahun 2015-2021.

Abstract:

This study aims to analyze the determinants of multidimensional poverty in eastern Indonesia during the period 2015–2021. The approach used is quantitative with panel data regression method, utilizing secondary data from Statistics Indonesia (BPS) and The Prakarsa. The variables analyzed include the open unemployment rate, high school completion rate, life expectancy, and slum area level on the multidimensional poverty rate (AKM) in 13 provinces. The estimation results show that the high school completion rate and life expectancy have a negative and significant effect on multidimensional poverty, while the open unemployment rate and slum area have no significant effect. This finding confirms that increasing access to and quality of secondary education and improving public health are key factors in reducing multidimensional deprivation in eastern Indonesia. The implications of this study highlight the importance of integrated development policies, not only focusing on increasing income, but also needing to be directed at strengthening community capabilities through inclusive education and health as the main strategy for alleviating multidimensional poverty.

Keywords: multidimensional poverty, unemployment, education, life expectancy, slums

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kemiskinan multidimensi di wilayah Indonesia bagian timur selama periode 2015–2021. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode regresi data panel, memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan The Prakarsa. Variabel yang dianalisis meliputi tingkat pengangguran terbuka, tingkat penyelesaian pendidikan SMA, angka harapan hidup, dan tingkat permukiman kumuh terhadap angka kemiskinan multidimensi (AKM) pada 13 provinsi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan SMA dan angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan multidimensi, sedangkan tingkat pengangguran terbuka dan permukiman kumuh tidak signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah serta perbaikan kesehatan masyarakat merupakan faktor kunci dalam menurunkan deprivasi multidimensi di kawasan timur Indonesia. Implikasi hasil penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan pembangunan yang terintegrasi, tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga perlu diarahkan pada penguatan kapabilitas masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif sebagai strategi utama pengentasan kemiskinan multidimensi.

Kata Kunci: kemiskinan multidimensi, pengangguran, pendidikan, angka harapan hidup, permukiman kumuh

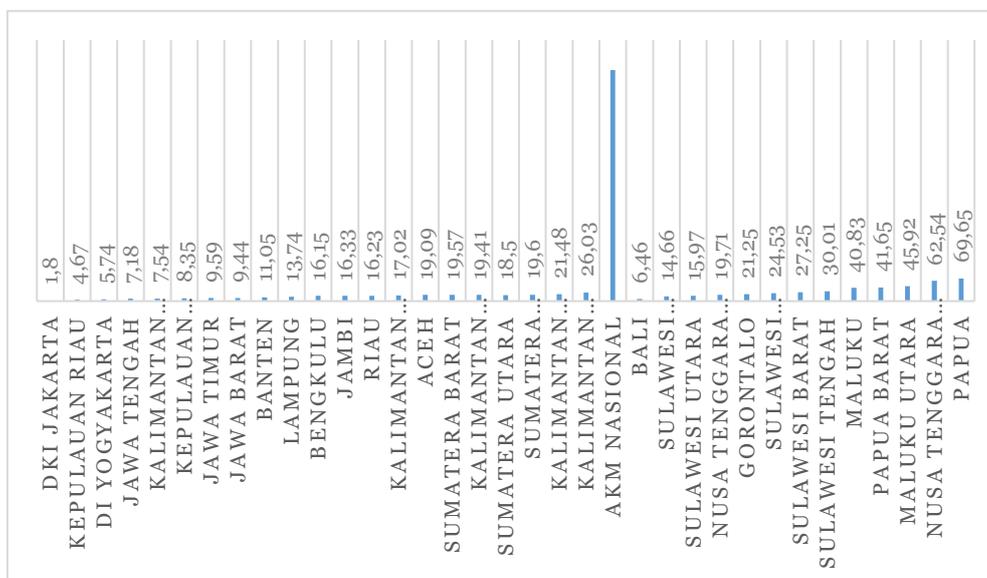
Kode Klasifikasi JEL: I32, P36, E24

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu struktural yang kompleks dan multidimensi, tidak hanya mencerminkan keterbatasan ekonomi semata, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar yang menentukan kualitas hidup. Di Indonesia, meskipun angka kemiskinan berdasarkan pendekatan moneter mengalami tren penurunan dalam dua dekade terakhir, namun pendekatan tersebut dinilai belum mampu merepresentasikan kondisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini mendorong pergeseran paradigma dalam pengukuran

kemiskinan dari pendekatan berbasis pengeluaran ke pendekatan multidimensional poverty, sebagaimana dikembangkan oleh (Alkire & Foster, 2011) dan diterapkan oleh UNDP melalui indeks Multidimensional Poverty Index (MPI).

Pendekatan kemiskinan multidimensi tidak hanya mengukur kekurangan dari sisi pendapatan, tetapi juga mengidentifikasi berbagai bentuk deprivasi dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Konsep ini berakar pada teori kapabilitas (Sen, 1999), yang memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga. Dalam konteks Indonesia, lembaga Prakarsa bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengadaptasi pendekatan MPI ke dalam Angka Kemiskinan Multidimensi (AKM), yang dinilai lebih relevan dengan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.



Sumber : data Badan Pusat Statistik (BPS)
Grafik 1 AKM 34 Provinsi di Indonesia tahun 2021

Disparitas AKM antara wilayah barat dan timur Indonesia sangat nyata. Papua mencatat AKM sebesar 69,65, diikuti Nusa Tenggara Timur (62,54) dan Maluku Utara (45,92), menandakan bahwa proporsi penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi di wilayah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah barat, seperti DKI Jakarta (1,80) dan Kepulauan Riau (4,67). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Indonesia bagian timur lebih kompleks, melibatkan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar secara simultan. Tantangan ini menuntut kebijakan yang lebih holistik dan spesifik untuk mengatasi deprivasi di berbagai dimensi kehidupan.

Secara teoritis, konsep kemiskinan multidimensi berakar pada teori kapabilitas Amartya Sen, yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan keterbatasan seseorang dalam mencapai fungsi-fungsi kehidupan yang bernilai (Sen, 1999). Pengukuran ini dioperasionalkan melalui Multidimensional Poverty Index (MPI) oleh (Alkire & Foster, 2011), yang menggabungkan indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Di Indonesia, pengukuran serupa dilakukan melalui Angka Kemiskinan Multidimensi (AKM), dengan penyesuaian indikator pada konteks nasional, seperti akses air bersih, kepemilikan aset, dan dokumen administrasi (Aidha et al., 2020).

Adapun beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai variabel yang berkorelasi signifikan dengan tingkat kemiskinan multidimensi. (Mustofa, 2018)

menunjukkan bahwa kondisi fisik tempat tinggal menjadi kontributor utama deprivasi multidimensi di Kota Yogyakarta. (Kause & Fithriyah, 2024) menemukan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan lokasi geografis merupakan faktor paling signifikan yang memengaruhi status kemiskinan multidimensi. Sementara itu, (Sumargo & Simanjuntak, 2019) menekankan pentingnya pendidikan dan layanan kesehatan dasar sebagai determinan utama. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut bersifat nasional atau berfokus pada satu wilayah kecil, dan belum secara eksplisit menelaah bagaimana dinamika faktor-faktor sosial ekonomi memengaruhi kemiskinan multidimensi di Indonesia bagian timur dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pengaruh beberapa variabel sosial ekonomi utama terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di 13 provinsi wilayah Indonesia bagian timur selama periode 2015–2021. Variabel yang dianalisis mencakup tingkat pengangguran terbuka, tingkat penyelesaian pendidikan SMA, angka harapan hidup, dan persentase permukiman kumuh. Masing-masing variabel dipilih berdasarkan kajian teoritis dan temuan empiris yang telah terbukti relevan dalam literatur sebelumnya.

Tingkat pengangguran terbuka merepresentasikan kondisi ketenagakerjaan dan kapasitas ekonomi daerah untuk menyerap angkatan kerja. Dalam perspektif (Todaro & Smith, 2020), pengangguran struktural yang berlangsung lama dapat memperburuk kondisi sosial, menghambat partisipasi ekonomi, dan meningkatkan risiko deprivasi di berbagai dimensi kesejahteraan. Beberapa studi di negara berkembang menunjukkan bahwa pengangguran memiliki efek domino terhadap dimensi pendidikan dan kesehatan (Baumann, 2021; Mahadea & Kaseeram, 2022).

Sementara itu, penyelesaian pendidikan menengah atas berperan penting dalam menentukan kapabilitas individu dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya membuka akses terhadap pekerjaan yang layak, tetapi juga meningkatkan literasi kesehatan dan kemampuan mengambil keputusan ekonomi yang rasional (Patrinós & Psacharopoulos, 2020). Pendidikan menjadi salah satu indikator utama dalam pengukuran kemiskinan multidimensi karena mencerminkan peluang hidup dan mobilitas sosial.

Angka harapan hidup digunakan sebagai indikator representatif dari kualitas kesehatan masyarakat. Harapan hidup yang lebih tinggi menunjukkan keberhasilan sistem kesehatan, akses terhadap pelayanan medis, serta keberlangsungan gaya hidup sehat (Bloom & Canning, 2000). Dalam berbagai studi, angka harapan hidup terbukti berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan multidimensi, karena individu yang sehat lebih produktif dan memiliki peluang ekonomi lebih besar (Cutler et al., 2006; Deaton, 2013).

Terakhir, variabel permukiman kumuh menggambarkan kondisi fisik tempat tinggal dan ketersediaan infrastruktur dasar. Keterbatasan dalam akses air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak berkontribusi langsung terhadap deprivasi dalam dimensi standar hidup. (UN-Habitat, 2020) menyatakan bahwa permukiman kumuh memperparah deprivasi lintas dimensi, terutama bagi anak-anak yang tinggal di lingkungan tersebut, karena keterbatasan fasilitas belajar, tingginya risiko penyakit, dan terbatasnya akses terhadap layanan sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan multidimensi di wilayah Indonesia bagian timur selama periode 2015–2021. Kompleksitas kemiskinan multidimensi di kawasan ini tidak hanya dipengaruhi oleh

keterbatasan pendapatan, tetapi juga oleh faktor-faktor struktural seperti tingkat pengangguran, penyelesaian pendidikan, angka harapan hidup, dan kondisi permukiman kumuh. Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada teori kapabilitas dan berbagai studi terdahulu yang menegaskan pentingnya pendekatan multidimensi dalam memahami kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengangguran, tingkat penyelesaian pendidikan SMA, angka harapan hidup, dan kondisi permukiman kumuh memengaruhi kemiskinan multidimensi di Indonesia bagian timur. Dengan mengidentifikasi determinan utama kemiskinan multidimensi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah yang masih tertinggal secara pembangunan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan studi longitudinal berbasis data panel untuk menganalisis determinan kemiskinan multidimensi di wilayah Indonesia bagian timur selama periode 2015–2021. Wilayah cakupan penelitian mencakup 13 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan Indonesia bagian timur secara konsisten mencatatkan angka kemiskinan multidimensi tertinggi secara nasional, serta memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda dibanding wilayah barat.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), seperti Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, Indikator Kesejahteraan Rakyat (IKR), Profil Kemiskinan Indonesia, serta Publikasi Provinsi dalam Angka. Data disusun dalam format panel, yaitu gabungan antara data time series (tahun 2015–2021) dan cross section (13 provinsi), sehingga menghasilkan total 91 observasi.

Tabel 1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran / Satuan
Variabel Dependen		
Kemiskinan Multidimensi (AKM)	Persentase penduduk yang mengalami deprivasi multidimensi pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.	Persentase %
Variabel Independen		
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan.	Persentase %

Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA	Persentase penduduk usia sekolah yang menyelesaikan pendidikan SMA/ sederajat.	Persentase %
Angka Harapan Hidup	Rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk di suatu wilayah.	Tahun
Permukiman Kumuh	Persentase rumah tangga yang tinggal di kawasan dengan infrastruktur dasar tidak memadai.	Persentase %

Analisis data dilakukan dengan pendekatan data panel, yang menggabungkan dimensi lintas waktu dan lintas provinsi untuk meningkatkan robustitas hasil estimasi. Model regresi data panel digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kemiskinan multidimensi sepanjang periode penelitian. Pemilihan model estimasi terbaik (Common Effect, Fixed Effect, atau Random Effect) dilakukan melalui serangkaian pengujian, termasuk uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Seluruh pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak EViews. Sebelum dilakukan estimasi, dilakukan pula uji asumsi klasik seperti multikolinearitas dan heteroskedastisitas untuk memastikan validitas model regresi yang digunakan. Hasil estimasi kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait determinan kemiskinan multidimensi di wilayah Indonesia bagian timur.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Data Panel. Regresi data panel dapat dimodelkan sebagai berikut :

$$AKM_{it} = \beta_0 + \beta_1(TPT)_{it} + \beta_2(Pendidikan_SMA)_{it} + \beta_3(AHH)_{it} + \beta_4(KUMUH)_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana i merupakan 13 provinsi wilayah Indonesia Timur, t merupakan tahun 2015-2021. Dengan keterangan AKM merupakan angka kemiskinan multidimensi, β_0 merupakan konstanta, β_{1-4} koefisien (*Regression Parameters*), TPT merupakan tingkat pengangguran terbuka, Pendidikan_SMA merupakan tingkat penyelesaian pendidikan SMA, AHH merupakan angka harapan hidup dan KUMUH merupakan pemukiman kumuh.

Dengan pendekatan dan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang kuat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan multidimensi serta menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif di kawasan yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Deskriptif

Sebelum melakukan analisis inferensial, penelitian ini terlebih dahulu menyajikan gambaran deskriptif terhadap variabel-variabel utama yang dianalisis. Statistik deskriptif ini meliputi rata-rata, nilai minimum, maksimum, serta standar deviasi untuk masing-masing variabel, sebagaimana tersaji dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (2015–2021)

Variabel	Rata-rata	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi
Kemiskinan Multidimensi (AKM) (%)	20,85	1,8	69,65	17,94
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,21	2,56	10,11	1,68
Pendidikan SMA Selesai (%)	61,05	35,54	87,61	13,42
Angka Harapan Hidup (tahun)	68,74	64,5	73,29	2,15
Permukiman Kumuh (%)	9,14	1,16	28,91	6,31

Analisis statistik deskriptif yang ditampilkan pada Tabel 2 memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai tingkat disparitas sosial ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur sepanjang periode penelitian. Rata-rata angka kemiskinan multidimensi (AKM) di kawasan ini tercatat sebesar 20,85 persen. Namun demikian, yang paling mencolok dari temuan ini adalah besarnya rentang sebaran AKM, mulai dari nilai minimum 1,80 persen hingga mencapai nilai maksimum 69,65 persen. Rentang yang sangat lebar ini menandakan adanya ketimpangan sosial ekonomi yang tajam antardaerah, mencerminkan bahwa upaya pembangunan manusia belum berlangsung secara merata. Di satu sisi, terdapat beberapa provinsi yang telah berhasil menurunkan tingkat deprivasi multidimensi secara signifikan, sehingga warganya telah memiliki akses yang memadai terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Akan tetapi, di sisi lain masih banyak provinsi yang justru tertinggal jauh, di mana sebagian besar penduduknya mengalami keterbatasan akses pada kebutuhan dasar, sehingga angka AKM mereka tetap sangat tinggi. Tingginya nilai maksimum AKM mempertegas bahwa kemiskinan multidimensi di kawasan timur Indonesia bersifat struktural dan berskala masif di beberapa provinsi, terutama yang secara geografis sulit dijangkau dan secara historis menghadapi berbagai keterbatasan dalam infrastruktur dan layanan publik.

Pada aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka di wilayah ini memiliki rata-rata sebesar 5,21 persen dengan standar deviasi 1,68. Nilai deviasi yang relatif rendah menunjukkan bahwa penyebaran angka pengangguran di antara provinsi-provinsi di kawasan timur cenderung lebih moderat dan tidak sekontras variasi AKM. Dengan nilai minimum sebesar 2,56 persen dan maksimum 10,11 persen, dapat diinterpretasikan bahwa sebagian provinsi telah mampu mengelola pasar tenaga kerja secara relatif efektif, tercermin dari tingkat pengangguran yang rendah. Namun, masih ada sejumlah provinsi yang menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai, sehingga penganggurannya berada pada level yang cukup tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa isu pengangguran tetap menjadi persoalan penting, namun ketimpangannya tidak setajam kemiskinan multidimensi, kemungkinan besar karena adanya peran sektor informal dan aktivitas subsisten yang dominan di sebagian besar wilayah timur Indonesia.

Selanjutnya, tingkat penyelesaian pendidikan SMA di kawasan timur Indonesia rata-rata mencapai 61,05 persen dengan standar deviasi yang cukup besar, yakni 13,42. Hal ini

menunjukkan adanya ketidakmerataan capaian pendidikan menengah antarprovinsi. Nilai minimum 35,54 persen menandakan bahwa di beberapa provinsi, lebih dari sepertiga penduduk usia sekolah tidak berhasil menyelesaikan pendidikan menengah. Kondisi ini merupakan indikator kuat tentang masih adanya kendala besar dalam hal akses maupun kualitas pendidikan di beberapa daerah, baik akibat keterbatasan fasilitas, jarak geografis, maupun kendala ekonomi keluarga. Sebaliknya, nilai maksimum mencapai 87,61 persen memperlihatkan bahwa di sejumlah provinsi, upaya peningkatan partisipasi pendidikan telah berhasil secara signifikan. Tingginya variasi ini semakin menegaskan urgensi untuk mendorong pemerataan mutu dan akses pendidikan, agar tidak terjadi “gap” antardaerah yang pada akhirnya dapat memperdalam jurang kemiskinan multidimensi.

Indikator berikutnya adalah angka harapan hidup, yang di kawasan ini memiliki rata-rata 68,74 tahun dengan rentang antara 64,50 tahun hingga 73,29 tahun dan standar deviasi 2,15. Penyebaran angka harapan hidup yang relatif sempit dibandingkan indikator lainnya mencerminkan bahwa ketimpangan kesehatan antarprovinsi cenderung lebih kecil, meskipun capaian rata-rata tersebut masih berada di bawah standar nasional. Hal ini menandakan bahwa kualitas layanan kesehatan dasar, status gizi, serta akses terhadap fasilitas kesehatan di wilayah timur Indonesia secara umum masih perlu ditingkatkan. Angka harapan hidup yang lebih rendah dari rata-rata nasional menjadi indikator bahwa sebagian provinsi masih dibebani oleh penyakit menular, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, maupun persoalan sanitasi lingkungan yang belum teratasi secara optimal.

Variabel terakhir yang turut dianalisis adalah persentase permukiman kumuh. Rata-rata kawasan kumuh di wilayah timur Indonesia mencapai 9,14 persen, dengan sebaran yang cukup luas antara 1,16 persen hingga 28,91 persen dan standar deviasi sebesar 6,31. Temuan ini menggambarkan adanya permasalahan serius terkait penyediaan infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan hunian layak, yang di beberapa provinsi masih sangat terbatas. Variasi yang tinggi di antara provinsi menandakan bahwa terdapat daerah-daerah yang telah berhasil menurunkan proporsi kawasan kumuh secara signifikan, namun di sisi lain masih banyak wilayah yang belum mendapatkan intervensi pembangunan permukiman secara optimal. Fakta ini menegaskan bahwa program-program perbaikan permukiman perlu lebih diarahkan pada wilayah yang tertinggal, agar capaian pemerataan kualitas lingkungan tempat tinggal dapat diwujudkan dan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan multidimensi menjadi lebih nyata.

Analisa Induktif

Analisis induktif dalam penelitian ini dilakukan menggunakan regresi data panel untuk mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel independen terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di wilayah Indonesia bagian timur. Model yang dipilih menghasilkan estimasi parameter seperti disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Hasil Uji Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
C	1091.074	68.77	15.86	0.000
Tingkat Pengangguran	0.43	0.47	0.90	0.366

Tingkat Penyelesaian SMA	-0.20**	0.09	-2.30	0.024
Angka Harapan Hidup	-15.31***	1.03	-1.48	0.000
Tingkat Pemukiman Kumuh	0.16	0.11	1.42	0.158

Keterangan Signifikansi:

*** signifikan pada tingkat 1% ($p < 0.01$)

** signifikan pada tingkat 5% ($p < 0.05$)

*signifikan pada tingkat 10% ($p < 0.10$)

Berdasarkan hasil estimasi regresi panel yang disajikan pada Tabel 3, diperoleh temuan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan SMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan multidimensi (AKM) di wilayah Indonesia bagian timur. Koefisien regresi sebesar -0,20 dan tingkat signifikansi 5% ($p = 0,024$) menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen dalam proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat) akan menurunkan angka kemiskinan multidimensi sebesar 0,20 persen. Hasil ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk kapabilitas dasar individu, yang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas ekonomi melalui pekerjaan layak, tetapi juga memperluas peluang partisipasi sosial dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Temuan ini sejalan dengan kerangka teori kapabilitas yang dikembangkan oleh (Sen, 1999), yang memandang pendidikan bukan semata sebagai instrumen ekonomi, melainkan sebagai prasyarat utama bagi individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Pendidikan memungkinkan seseorang untuk memahami hak-haknya, meningkatkan daya tawar dalam pasar tenaga kerja, dan membentuk kemampuan untuk memilih kehidupan yang ia nilai penting. Dalam konteks wilayah timur Indonesia, di mana ketimpangan pendidikan masih menjadi tantangan struktural, hasil ini memperkuat urgensi peningkatan akses terhadap pendidikan menengah. Tingkat partisipasi yang masih rendah, khususnya di daerah-daerah terpencil, berdampak langsung terhadap dimensi pendidikan dalam AKM, serta secara tidak langsung memengaruhi dimensi lainnya seperti kesehatan dan standar hidup.

Selanjutnya, angka harapan hidup juga terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap AKM, dengan koefisien sebesar -15,31 dan tingkat signifikansi 1% ($p < 0,01$). Interpretasi dari hasil ini adalah bahwa setiap kenaikan satu tahun dalam angka harapan hidup masyarakat di suatu wilayah diasosiasikan dengan penurunan kemiskinan multidimensi sebesar 15,31 persen. Signifikansi yang tinggi dari variabel ini menunjukkan bahwa aspek kesehatan berperan sangat besar dalam menentukan tingkat kesejahteraan secara multidimensi. Umur panjang yang dicapai secara merata merepresentasikan keberhasilan sistem kesehatan masyarakat dalam memberikan layanan preventif, kuratif, dan promotif yang menjangkau seluruh lapisan penduduk.

Dalam literatur pembangunan, harapan hidup sering kali digunakan sebagai indikator akumulatif dari berbagai intervensi kesehatan, seperti peningkatan gizi, layanan persalinan, imunisasi, sanitasi, hingga cakupan asuransi kesehatan. Oleh karena itu, temuan ini

mempertegas perlunya investasi publik yang lebih intensif di bidang kesehatan, terutama pada wilayah-wilayah yang masih menghadapi ketimpangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Secara khusus, wilayah Indonesia bagian timur memiliki tantangan geografis yang besar dalam hal distribusi tenaga medis, ketersediaan puskesmas, dan kualitas infrastruktur kesehatan. Dengan demikian, hasil ini memberi justifikasi kuat bagi perumusan kebijakan kesehatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berbasis pemerataan layanan dasar.

Di sisi lain, dua variabel lain yang diuji dalam model, yaitu tingkat pengangguran terbuka dan persentase permukiman kumuh, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap AKM. Nilai probabilitas dari kedua variabel tersebut masing-masing sebesar 0,366 dan 0,158, melebihi ambang batas signifikansi konvensional ($\alpha = 0,05$). Meskipun demikian, koefisien regresi dari keduanya tetap menunjukkan arah hubungan yang positif, yang berarti bahwa secara teoritis, peningkatan pengangguran dan pertumbuhan kawasan kumuh cenderung meningkatkan risiko deprivasi multidimensi, namun pengaruhnya tidak cukup kuat untuk terdeteksi secara statistik dalam model ini.

Pada variabel tingkat pengangguran terbuka, ketidaksignifikanan tersebut dapat dijelaskan dari karakteristik struktur ekonomi wilayah timur Indonesia yang didominasi oleh sektor informal dan aktivitas subsisten, seperti pertanian lahan kering, nelayan tradisional, serta usaha mikro rumah tangga. Aktivitas-aktivitas ini sering kali tidak tercatat secara resmi dalam statistik ketenagakerjaan konvensional, sehingga tingkat pengangguran terbuka yang dilaporkan tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, dalam kondisi keterbatasan lapangan kerja formal, banyak penduduk yang memilih untuk tidak masuk ke dalam angkatan kerja, menyebabkan fenomena underemployment atau pengangguran terselubung yang tidak tercermin dalam indikator resmi. Oleh karena itu, meskipun pengangguran secara teori meningkatkan kerentanan ekonomi dan sosial, hasil empiris dalam konteks ini menunjukkan bahwa variabel tersebut belum cukup mampu menjelaskan variasi AKM.

Adapun pada variabel permukiman kumuh, koefisien positif menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase kawasan tidak layak huni, maka semakin besar pula potensi terjadinya deprivasi multidimensi. Namun, tidak signifikan secara statistiknya variabel ini kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan cakupan dan kualitas data yang digunakan. Data persentase kawasan kumuh sering kali diperoleh dari estimasi atau pelaporan administratif, yang belum tentu mencerminkan kondisi aktual di tingkat rumah tangga. Di sisi lain, terdapat kemungkinan bahwa intervensi pemerintah dalam penataan kawasan kumuh (seperti program Kotaku atau Urban Slum Upgrading) telah memberikan efek perbaikan di beberapa daerah, namun efek tersebut belum cukup merata dan terdokumentasi dengan baik dalam data agregat yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, heterogenitas penanganan kawasan kumuh antarprovinsi juga berpotensi memengaruhi signifikansi variabel ini dalam model regresi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data panel terhadap 13 provinsi di wilayah Indonesia bagian timur selama periode 2015–2021, penelitian ini menyimpulkan bahwa kapabilitas dasar masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, merupakan determinan paling signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan multidimensi (AKM). Temuan ini ditunjukkan secara statistik melalui pengaruh negatif dan signifikan dari variabel tingkat penyelesaian pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat) dan angka harapan hidup terhadap AKM. Peningkatan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan menengah terbukti berkontribusi pada

penurunan deprivasi dalam dimensi pendidikan, sekaligus memperluas peluang ekonomi dan partisipasi sosial. Sementara itu, kenaikan angka harapan hidup mencerminkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara umum, yang secara langsung memengaruhi kemampuan individu untuk hidup lebih produktif dan bermartabat.

Temuan ini mengafirmasi teori kapabilitas Amartya Sen, yang menekankan bahwa kemiskinan tidak semata-mata persoalan kekurangan pendapatan, melainkan keterbatasan dalam akses terhadap kebebasan substantif untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Oleh karena itu, pembangunan manusia melalui perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan bukan hanya bersifat instrumental, tetapi esensial dalam kerangka pembangunan yang berkeadilan.

Di sisi lain, variabel tingkat pengangguran terbuka dan persentase permukiman kumuh tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan multidimensi. Meskipun arah hubungan koefisien keduanya positif, ketidaksignifikan ini menandakan bahwa intervensi terhadap sektor ketenagakerjaan dan permukiman kumuh belum memberikan dampak nyata yang terukur dalam konteks deprivasi multidimensi di wilayah penelitian. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan kualitas data, tingginya informalitas pasar tenaga kerja, atau belum terintegrasinya program perumahan dengan dimensi pembangunan manusia lainnya.

Berdasarkan temuan empiris dalam penelitian ini, dapat disarankan bahwa arah kebijakan pengentasan kemiskinan multidimensi di Indonesia bagian timur perlu difokuskan pada perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan menengah serta penguatan layanan kesehatan dasar. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus memprioritaskan pembangunan sekolah menengah atas di wilayah tertinggal, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik, sarana prasarana pendidikan, dan pemberian insentif pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin. Dalam konteks kesehatan, perluasan cakupan layanan primer seperti imunisasi, pemantauan gizi balita, serta perawatan kesehatan ibu dan anak menjadi sangat mendesak, khususnya bagi provinsi-provinsi dengan angka harapan hidup yang masih berada di bawah rata-rata nasional.

Selain itu, diperlukan upaya pembaruan sistem statistik sosial ekonomi yang digunakan dalam perumusan kebijakan publik. Ketidaksignifikan pengaruh variabel pengangguran dan permukiman kumuh dalam penelitian ini menandakan perlunya peningkatan kualitas data yang mampu menangkap kompleksitas sosial lokal, termasuk sektor informal yang dominan di wilayah Indonesia timur. Pemerintah juga didorong untuk menerapkan pendekatan pembangunan yang kontekstual berbasis wilayah, di mana setiap kebijakan intervensi disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosial, dan budaya lokal, sehingga dapat lebih efektif dalam mengatasi akar permasalahan deprivasi multidimensi.

Rekomendasi penting lainnya adalah penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan sosial yang telah berjalan. Setiap program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dievaluasi secara berkala dengan pendekatan berbasis bukti, agar intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mendorong perbaikan kapabilitas dasar masyarakat. Dengan demikian, strategi pengentasan kemiskinan multidimensi tidak lagi semata-mata berfokus pada peningkatan angka pendapatan, tetapi lebih mengarah pada transformasi struktural yang menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang layak. Pendekatan ini akan memperkuat fondasi pembangunan manusia secara berkelanjutan dan berkeadilan di wilayah Indonesia bagian timur.

DAFTAR RUJUKAN

- Aidha, C. N., Ningrum, D. R., Armintasari, F., Herawati, Ramdlaningrum, H., Sagala, M., Thariq, R. M., & Kartika, W. (2020). Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2015-2018. In *Prakarsa*.
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476-487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Baumann, P. (2021). A general conceptual framework for multi-dimensional spatio-temporal data sets. *Environmental Modelling and Software*, 143(June), 105096. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2021.105096>
- Bloom, D. E., & Canning, D. (2000). The Health and Wealth of Nations. In *Jurnal Society* (Vol. 287, Issue 5456). <https://doi.org/10.1126/science.287.5456.1207>
- Cutler, D., Deaton, A., & Lleras-Muney, A. (2006). The determinants of mortality. *Journal of Economic Perspectives*, 20(3), 97-120. <https://doi.org/10.1257/jep.20.3.97>
- Deaton, A. (2013). The great escape. *Sight and Sound*, 22(5), 40-42.
- Kause, J., & Fithriyah, F. (2024). Analisis Determinan Kemiskinan Multidimensi Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 4(2), 115-127. <https://doi.org/10.23969/jrie.v4i2.98>
- Mahadea, D., & Kaseeram, I. (2022). Impact of unemployment and income on entrepreneurship in post-apartheid South Africa: 1994-2015. *Pharos Journal of Theology*, 103, 1-9. <https://doi.org/10.4102/sajesbm.v10i1.0115>
- Mustofa, M. (2018). Kemiskinan Multidimensi Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 15(1), 27-34. <https://doi.org/10.21831/jep.v15i1.19706>
- Patrinos, H. A., & Psacharopoulos, G. (2020). Returns to Education in Developing Countries Patrinos Psacharopoulos. In *The Economics of Education* (pp. 53-64).
- Sen, A. (1999). Develoepment as freedom. *Anchor Books, New York*, 384.
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 160-172. <https://doi.org/10.21002/jepi.2019.10>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition).
- UN-Habitat. (2020). *The Value of Sustainable Urbanization*. <https://doi.org/10.18356/c41ab67e-en>